



## KETATANEGARAAN INDONESIA DIBAWAH MASA PENDUDUKAN JEPANG (1942-1945)

Duma Lumban Gaol<sup>1</sup>, Reka Seprina<sup>2</sup>

[dumalumbangaol9404@gmail.com](mailto:dumalumbangaol9404@gmail.com)<sup>1</sup>, [reka.seprina@unja.ac.id](mailto:reka.seprina@unja.ac.id)

Universitas Jambi<sup>1,2</sup>

### Informasi Artikel

#### Kata Kunci :

Pemerintahan Militer,  
Ketatanegaraan, Jepang,  
Indonesia

#### Keywords:

Military Governance,  
constitutional, Japanese  
Occupation, Indonesian



This is an open access article under  
the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright ©2024 by Author.  
Published by Universitas Jambi

### ABSTRAK

Artikel ini mengulas mengenai sistem pemerintahan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Penelitian dilakukan melalui pendekatan sejarah dengan empat langkah, yakni penyelidikan sumber, evaluasi sumber, interpretasi, dan analisis historiografi. Ditemukan bahwa periode pemerintahan Jepang selama tiga setengah tahun memiliki signifikansi penting dalam sejarah Indonesia, terutama setelah mengalahkan Belanda dan langsung mengambil alih pemerintahan Hindia Belanda. Pada 8 Maret 1942, Jepang secara resmi menguasai Indonesia dan menginisiasi perubahan untuk mengurangi pengaruh Barat. Dalam sistem administrasinya, Jepang menerapkan pemerintahan militer di mana kekuasaan terpusat pada panglima tentara, berbeda dengan pemerintahan kolonial Belanda yang lebih menekankan pada administrasi sipil yang mencakup bidang politik, ekonomi-sosial, pendidikan, dan militer.

### ABSTRACT

This article explores the governmental structure during the Japanese occupation in Indonesia. Employing a historical approach, the research methodology encompasses four stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The findings underscore the significance of the three and a half year Japanese rule in Indonesian history. Following the defeat of the Netherlands, Japan assumed control over the Dutch East Indies administration. On March 8, 1942, Japan formally occupied Indonesia and swiftly instituted reforms to dismantle Western hegemony. The Japanese administration in Indonesia adopted a military-centric governance model, with authority vested in the army commander, diverging from the civil governance system prevalent during Dutch colonial rule. This encompassed various spheres such as politics, socio-economics, education, and military affairs.

### PENDAHULUAN

Sebelum kedatangan Jepang ke Indonesia, Belanda telah lama menguasai wilayah tersebut selama sekitar 350 tahun. Lama penguasaan ini menyebabkan karakter masyarakat pada masa penjajahan Belanda terbentuk sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh negara tersebut. Selama periode kolonialisme, Belanda menerapkan empat kebijakan yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan bagi masyarakat. Pertama, kontingenen memaksa masyarakat Indonesia untuk membayar pajak atas hasil bumi kepada Belanda. Kedua, verplichte leverantie mengharuskan masyarakat untuk menjual hasil panen mereka kepada Belanda dengan harga yang sangat rendah. Kebijakan ketiga, preangerstelsel, memaksa penduduk Priangan untuk bercocok tanam kopi. Terakhir, kerja rodi memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja tanpa upah, sehingga banyak yang meninggal karena kelaparan. Dari saat itu, penderitaan rakyat Indonesia dimulai, ditandai dengan kemiskinan, kelaparan, penyebaran penyakit, kematian yang meningkat akibat kelaparan dan kekejaman penjajah, serta keterbelakangan dan ketidaktahuan yang meluas di seluruh Indonesia (Wicaksono, 2021:91).

Pada tahun 1755, VOC berhasil menguasai secara politik pulau Jawa melalui perjanjian Giyanti, yang mengakibatkan kehilangan kekuasaan politik bagi raja. Tindakan campur tangan pemerintah kolonial dalam urusan keraton juga mengakibatkan peran ulama sebagai penasihat keraton semakin terpinggirkan. Eksploitasi tanah dan sistem tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial menyebabkan penderitaan bagi rakyat, menimbulkan rasa ketakutan dan menciptakan kebutuhan akan pemimpin informal (ulama) saat peran para raja dianggap tidak lagi mampu memberikan perlindungan dan keamanan (Hasim, 2018:281).

Transisi dari masa kekuasaan kolonial Belanda ke masa pendudukan Jepang menunjukkan fase yang suram dalam sejarah Indonesia. Derita yang telah dirasakan oleh bangsa Indonesia tidak berakhir, baik di bawah pemerintahan Belanda maupun Jepang. Meskipun terdapat perbedaan dalam cara kedua kekuatan tersebut memperlakukan Indonesia, keduanya meninggalkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Jepang dengan mudah mengambil alih kendali atas Indonesia dari tangan Belanda, merebut lokasi-lokasi penting seperti Tarakan pada 12 Januari 1942. Perlawanan Belanda terhadap invasi Jepang berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian Kalijati pada 9 Maret 1942, yang menandai dimulainya masa pendudukan Jepang.

Pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang secara resmi mengambil alih kendali atas Indonesia dan segera memulai upaya untuk mengurangi pengaruh Barat. Strategi Jepang yang terkenal dengan semboyan seperti Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia, berhasil meraih dukungan dan simpati dari masyarakat Indonesia. Mereka dianggap sebagai pembebas dari penjajahan Belanda, terutama karena kesamaan fisik antara orang Jepang dan Indonesia, yang menjadi kelebihan bagi Jepang. Pemerintah Jepang menyadari bahwa pengaruh Barat masih kuat di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga mereka secara teratur melakukan penyesuaian. Pejabat Belanda yang ditahan dibebaskan untuk melatih orang Indonesia agar siap mengambil alih pemerintahan. Niat Jepang untuk mempekerjakan orang Indonesia sebagai bagian dari konsep "Asia untuk Asia" menunjukkan upaya mereka dalam mengubah dinamika politik dan budaya di Indonesia (Fadli & Kumalasari, 2019:190).

Masa pemerintahan Jepang selama tiga setengah tahun ini dianggap singkat jika dibandingkan dengan masa kekuasaan sebelumnya oleh Belanda, mencerminkan harapan besar dari rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Jepang. Sebelumnya, rakyat Indonesia sangat menginginkan kemerdekaan, dan kedatangan Jepang awalnya disambut dengan antusiasme yang tinggi. Namun, respons positif tersebut berubah ketika diketahui bahwa tujuan kedatangan Jepang ke Indonesia tidak lebih baik dari pemerintahan Belanda sebelumnya. Fakta menunjukkan bahwa Jepang justru menunjukkan perilaku kejam, brutal, dan tanpa ampun dalam menghukum rakyat Indonesia yang dianggap memberontak atau menentang pemerintahannya. Sikap yang semula positif berubah menjadi rasa kebencian karena tindakan represif Jepang di Indonesia (Aprilia dkk, 2017: 261).

Dengan penyerahan tanpa syarat yang dilakukan oleh Letnan Jenderal H. Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia kepada tentara ekspedisi Jepang yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, era pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia berakhir. Ini menandai dimulainya kekuasaan resmi Kemaharajaan Jepang, menandai awal dari periode

pendudukan militer Jepang di Indonesia. Selama periode ini, terjadi pembentukan struktur pemerintahan yang berbeda dengan zaman Hindia Belanda. Ada tiga pemerintahan militer pendudukan yang beroperasi: Pemerintahan militer Angkatan Darat (Tentara Keduapuluh lima) di Sumatera dengan pusatnya di Bukittinggi, Pemerintahan militer Angkatan Darat (Tentara Keenambelas) di Jawa-Madura dengan pusatnya di Jakarta, dan Pemerintahan militer Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua) yang bertanggung jawab atas daerah yang mencakup Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusatnya di Makasar (Poesponegoro, M.D, dan Notosusanto, 2008: 5).

Inilah yang ingin disampaikan penulis bahwa Jepang senantiasa menunjukkan sikap ramah terhadap bangsa Indonesia untuk mendapatkan dukungannya, sekaligus merencanakan langkah-langkah untuk menguasai Indonesia. Dengan cara ini, Jepang melaksanakan misinya dengan menerapkan sistem pemerintahan militer dan kebijakannya, serta penggunaan berbagai strategi untuk memperoleh simpati dari masyarakat Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, fokus kajian ini adalah untuk mengupas sistem pemerintahan atau tata negara pada periode pendudukan Jepang di Indonesia. Kajian ini akan mencakup periode awal kekuasaan Jepang hingga implementasi kebijakan-kebijakan yang diterapkan selama masa tersebut. Menurut peneliti, artikel ini menarik karena mencerminkan simpati terhadap Jepang, yang berhasil mengusir Belanda dari Indonesia selama masa pendudukan.

## **METODE**

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan sejarah (History) sebagai metodenya. Metode sejarah merujuk pada teknik atau cara untuk merekonstruksi peristiwa yang terjadi di masa lalu, dengan melibatkan empat tahap kerja esensial, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (penilaian sumber eksternal dan internal), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan kisah sejarah) (Hamid & Madjid 2011: 43).

Pada tahap heuristik, peneliti mengumpulkan dan mencari berbagai sumber, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Langkah berikutnya adalah mengevaluasi secara kritis sumber-sumber tersebut untuk memeriksa keotentikan, keaslian, dan relevansinya. Proses ini melibatkan dua pendekatan, yaitu kritik intern dan ekstern. Kritik intern fokus pada memverifikasi kebenaran isi teks, sementara kritik ekstern mengevaluasi keaslian materi atau bahan yang digunakan. Pada tahap kedua, kritik sumber dilakukan untuk memastikan Menilai keotentikan dan relevansi data yang terkumpul adalah sebuah proses yang melibatkan penilaian baik dari segi internal maupun eksternal. Fokus utamanya adalah memastikan kebenaran isi dan orisinalitas materi yang ada. Zed (2004) menjelaskan bahwa kritik internal berfokus pada pemeriksaan kebenaran isi teks, sementara kritik eksternal menyangkut validitas materi. Langkah selanjutnya adalah interpretasi, yang melibatkan dua jenis analisis, yaitu analisis dan sintesis. Setelah melalui proses uji kelayakan, data yang telah dianalisis akan disatukan kembali melalui sintesis. Hasil dari sintesis tersebut akan menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk membentuk pemahaman yang sesuai dengan fakta yang ada (Kuntowijoyo, 2013).

Tahap terakhir dalam rangkaian proses tersebut adalah historiografi, yang melibatkan pengembangan karya tulis sejarah setelah mengumpulkan semua data dan informasi. Tujuan historiografi adalah mengorganisir bukti-bukti konkret atau fakta menjadi narasi sejarah yang tercatat secara tertulis. Penulisan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya, dengan referensi yang dapat dipercaya dan dijamin keandalannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Sejarah Pendudukan Jepang Di Indonesia***

Selama masa penjajahan Jepang di wilayah yang pada saat itu masih dikenal sebagai Hindia Belanda, dimulai pada bulan Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo mengambil alih jabatan Perdana Menteri Jepang dari Konoe Fumimaro. Pada awalnya, hingga akhir tahun 1940, pemerintah militer Jepang tidak memiliki rencana untuk menghadapi beberapa negara secara bersamaan. Namun, mulai pertengahan tahun 1941, pandangan mereka berubah ketika menyadari bahwa untuk menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara, mereka perlu menghadapi Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda secara bersamaan. Keputusan ini semakin diperkuat setelah Amerika Serikat memberlakukan embargo minyak yang sangat penting bagi industri Jepang dan kebutuhan perang mereka. Laksamana Isoroku Yamamoto, Panglima Angkatan Laut Jepang, merancang strategi perang yang ambisius, yaitu memanfaatkan seluruh kekuatan armadanya untuk dua operasi besar. Potensi Angkatan Laut Jepang mencakup 6 kapal induk, 10 kapal perang, 18 kapal penjelajah berat, 20 kapal penjelajah ringan, 4 kapal pengangkut perlengkapan, 112 kapal perusak, 65 kapal selam, dan 2.274 pesawat tempur.

Pada tanggal 7 Desember 1941, armada Jepang melancarkan serangan mendadak terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan ini dipimpin oleh Admiral Chuichi Nagumo dan melibatkan 6 kapal induk, 2 kapal perang, 11 kapal perusak, serta lebih dari 1.400 pesawat tempur. Serangan kedua mereka, yang melibatkan sisa kekuatan Angkatan Laut, mendukung Angkatan Darat dalam Operasi Selatan dengan menyerang Filipina dan Malaya/Singapura, yang kemudian akan dilanjutkan ke Jawa. Kekuatan ini terdiri dari 11 Divisi Infanteri, 7 resimen tank, dan 795 pesawat tempur, dengan rencana operasi diselesaikan dalam 150 hari. Pada pagi itu, sebanyak 360 pesawat, termasuk pembawa torpedo dan pesawat tempur, diluncurkan dalam dua gelombang serangan, menghancurkan 188 pesawat dan merusak delapan kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat. Dalam dua jam pengeboman, 2.402 orang Amerika tewas dan 1.283 lainnya luka-luka. Meskipun demikian, tiga kapal induk Amerika berhasil selamat karena saat itu tidak berada di Pearl Harbor. Pada 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang, diikuti oleh deklarasi perang dari Jerman tiga hari kemudian. Ini menyebabkan Amerika Serikat bergabung dengan pasukan Sekutu dan terlibat dalam pertempuran di Eropa dan Asia Pasifik.

Dampak besar dari konflik di Pasifik tercermin dalam pengaruhnya terhadap gerakan kemerdekaan di Asia Timur, termasuk Indonesia. Serangan dan pendudukan oleh Jepang terhadap Hindia Belanda bertujuan untuk menguasai sumber daya alam,

terutama minyak bumi, yang vital bagi kekuatan perang Jepang serta untuk mendukung industri mereka. Jawa dijadikan sebagai pusat logistik untuk operasi militer di seluruh Asia Tenggara, sementara Sumatra dianggap sebagai sumber utama pasokan minyak.

Dalam sejarah Indonesia, Jepang pernah menguasai Hindia-Belanda (nama Indonesia pada masa kolonial). Setelah daerah kekuasaan Hindia-Belanda jatuh di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, Jepang lebih mudah menaklukkan pusat kekuasaan Hindia-Belanda di Batavia (kini Jakarta). Divisi ke-2 Tentara Jepang pertama kali mendarat di Jawa Barat, sementara Divisi ke-48 di Jawa Tengah di bawah komando Letnan Jenderal Hitoshi Imamura untuk menghadapi Sekutu dalam memperebutkan Jawa. Kekuatan Jepang kemudian diperkuat dengan Divisi ke-38 di bawah Kolonel Shoji, dan pasukan Jepang dari daerah Indonesia utara juga turut bergabung. Dominasi Jepang diperkuat oleh angkatan udara mereka yang kuat serta kelemahan angkatan udara Belanda. Dengan penyebaran militer Jepang di seluruh Jawa, kekuatan mereka jauh lebih besar daripada Sekutu, menghasilkan kekalahan bagi Belanda. Pada 1 Maret 1942, Tentara ke-16 Jepang mendarat di Teluk Banten, Eretan Wetan (Jawa Barat), dan Kragan (Jawa Tengah).

Jakarta kemudian diumumkan sebagai "kota terbuka" oleh Jepang pada 5 Maret 1942, menandakan berakhirnya kekuasaan Belanda di sana. Tentara Jepang kemudian menguasai daerah sekitarnya, termasuk Bogor. Penyerahan kekuasaan dari Pemerintah Kolonial Belanda kepada pemerintah militer Jepang dilanjutkan dengan ekspedisi ke Bandung pada 1 Maret, dengan Kolonel Toshinori Shoji memimpin 5.000 pasukan yang sudah berkumpul di Eretan, di sebelah barat Cirebon. Mereka berhasil mengamankan Subang dan memasuki Bandung melalui Lembang dan Sumedang dengan sambutan banzai dari masyarakat setempat. Masyarakat Bandung menyambut kedatangan tentara Jepang dengan antusias karena dianggap sebagai pembebasan dari penjajahan Belanda (Sofianto, 2014: 53).

Oleh karena itu, dalam situasi tersebut, mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk terus menekan Belanda dan sekutunya dengan merebut lapangan terbang Kalijati yang berjarak sekitar 40 km dari Bandung. Meskipun Belanda berupaya merebut kembali wilayah itu hingga 4 Maret 1942, upaya mereka berhasil dihentikan oleh serangan mendadak Detasemen Shoji, menyebabkan situasi yang genting bagi tentara KNIL. Pada 6 Maret 1942, panglima KNIL, Letnan Jenderal Ter Poorten, memerintahkan panglima di Jawa Barat, Mayor Jenderal J.J. Pesman, untuk menghindari pertempuran karena Bandung telah menjadi kota mati yang dihuni oleh penduduk sipil, termasuk wanita dan anak-anak. Setelah Jepang menduduki KNIL di Lembang pada 7 Maret 1942, pasukan Belanda di sekitar Bandung menyerah pada petang hari. Pasukan Belanda menyatakan penyerahan lokal yang kemudian disampaikan oleh Kolonel Shoji kepada Jenderal Imamura.

Ancaman pemboman Bandung dari udara diajukan jika Belanda tidak mematuhi ultimatum Jepang. Jenderal Imamura juga menuntut partisipasi Gubernur Jenderal Belanda dalam perundingan di Kalijati. Meskipun ancaman pemboman Bandung disampaikan, pada akhirnya, Belanda patuh terhadap tuntutan Jepang. Gubernur Jenderal Tjarda van Starckenborgh Stachouwer, Panglima Tentara Hindia Belanda, bersama beberapa pejabat militer tinggi dan seorang penerjemah melakukan perjalanan ke Kalijati, di mana mereka bertemu dengan Letnan Jenderal Imamura yang datang dari

Batavia (Jakarta). Hasil pertemuan tersebut adalah kapitulasi tanpa syarat Angkatan Perang Hindia Belanda kepada Jepang

### ***Kebijakan Pemerintahan Pendudukan Jepang***

Secara prinsip, kebijakan pemerintah Jepang terhadap penduduk Indonesia memiliki dua fokus utama: mengurangi pengaruh Barat di tengah masyarakat dan mendorong mereka untuk mendukung upaya militer Jepang. Seperti pemerintah Kolonial Belanda sebelumnya, pemerintah militer Jepang juga berusaha mengendalikan Indonesia demi kepentingan mereka sendiri. Mereka menghadapi tantangan yang serupa dengan pemerintah Kolonial Belanda dan menggunakan pendekatan yang serupa untuk mengatasinya. Meskipun begitu, dalam konteks perang yang melibatkan penggunaan maksimal sumber daya, Jepang memutuskan untuk mengambil kendali melalui mobilisasi, terutama di wilayah Jawa dan Sumatera. Seiring berjalannya perang, upaya mereka semakin intensif untuk mendapatkan dukungan dan memobilisasi penduduk Indonesia (Ricklefs, 2008: 425-426).

Untuk mengurangi dominasi budaya Barat, pemerintah Jepang mengambil langkah-langkah tertentu dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Sebagai alternatif, mereka mendorong penggunaan bahasa Jepang dan meningkatkan pendidikan tinggi dengan melarang buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris. Selain itu, mereka mengadopsi kalender Jepang untuk keperluan resmi, menghapuskan patung-patung Belanda, menamai ulang jalan-jalan, dan menerapkan model baru untuk sekolah-sekolah. Jepang juga menerapkan kebijakan perencanaan bahasa di Indonesia dengan menghapuskan penggunaan bahasa Belanda, sambil mempromosikan bahasa Indonesia dan Jepang. Upaya Jepang untuk memastikan keberhasilan kebijakannya ini juga terlihat dari pengumuman bertahap mengenai kewajiban menggunakan bahasa Jepang dan Indonesia dalam konteks seperti merek, nama toko, surat, dan sebagainya (Permadi dan Purwaningsih, 2015: 593).

Suatu kampanye propaganda yang gigih mencoba meyakinkan penduduk Indonesia bahwa mereka dan bangsa Jepang bersatu dalam upaya menciptakan tatanan baru di Asia telah dimulai. Pesan ini disebarkan kepada para petani melalui pengeras suara yang dipasang di setiap desa. Namun, upaya propaganda ini seringkali gagal karena realitas dari pendudukan Jepang yang sarat dengan gejolak, seperti masalah ekonomi, tindak teror, kerja paksa, penarikan hasil panen, perilaku arogan, dan kekejaman yang dilakukan oleh individu Jepang secara umum. Tindakan kekerasan, pelecehan seksual, dan tekanan untuk memberikan penghormatan kepada orang Jepang juga sering terjadi. Masyarakat yang pada awalnya menyambut kedatangan Jepang sebagai pembebas seringkali merasa kecewa dan putus asa dengan cepat (Aman, 2015: 50).

Untuk mendapatkan dukungan dari penduduk, pemerintah Jepang mencari tokoh politik baru di Jawa. Tindakan awal yang mereka ambil adalah menghapus semua kelompok politik dan melarang kegiatan politik pada bulan Maret 1942. Semua organisasi resmi juga dibubarkan, dan pihak Jepang segera membentuk organisasi-organisasi baru. Proses ini secara khusus melibatkan Islam sebagai pilihan utama, yang menjadi jelas pada akhir Maret 1942 ketika pemerintah Jepang mendirikan Kantor

Urusan Agama (Shumubu) di Jawa (Ricklefs, 2008: 428).

Selama masa pemerintahan Jepang di Indonesia yang menggantikan kekuasaan Hindia Belanda, terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam perlakuan terhadap rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang diharapkan akan membawa perbaikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama karena keduanya memiliki asal usul yang sama sebagai bangsa Asia. Perbedaan antara kedua pemerintahan tersebut sangat terlihat. Sebelumnya, Belanda melakukan dekonstruksi terhadap Islam dan menggantikannya dengan hukum adat, sehingga ulama kehilangan kendali atas masyarakat, dan perlawanan terhadap pemerintahan Belanda sering kali bersifat anti-Belanda. Namun, pendekatan yang dilakukan oleh Jepang berbeda karena mereka berusaha untuk mempelajari kebijakan yang diterapkan oleh Belanda. Jepang cenderung berusaha menjaga hubungan yang damai dengan Islam dan tidak melakukan tindakan yang merusak terhadap agama tersebut. Bahkan, mereka berupaya melibatkan tokoh-tokoh Islam untuk meredam kemungkinan munculnya gerakan perlawanan. Dengan demikian, selama masa pemerintahan Jepang, terjadi dinamika hubungan yang berbeda antara pemerintah dan umat Islam jika dibandingkan dengan masa pemerintahan Hindia Belanda.

Menurut Ricklefs (2012: 119), terdapat perbedaan yang signifikan selama masa pemerintahan Jepang di Indonesia yang tampak dalam hal pendidikan politik dan keterlibatan kiai NU. Sebelum kedatangan Jepang, kelompok Modernis yang berpusat di perkotaan aktif secara politik, meskipun Muhammadiyah berusaha untuk tetap netral dalam politik anti-kolonial dan menjaga kerja sama dengan pemerintah kolonial dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan. Kebijakan Jepang terhadap Islam di Indonesia menarik perhatian melalui dukungannya terhadap dasar-dasar Islam di tingkat akar rumput. Jepang terbukti lebih mendekati aspirasi Islam daripada nasionalis sekuler, dengan maksud untuk memobilisasi dukungan Islam guna mencapai tujuan perang mereka secara cepat dan efektif (Fadli dan Hidayat, 2018: 35).

Jepang telah menerapkan beberapa kebijakan dengan tujuan memperoleh dukungan dan simpati dari rakyat serta pemimpin Indonesia. Beberapa di antaranya mencakup:

1. Jepang menyatakan dirinya sebagai saudara tua Indonesia, dengan niat membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan asing. Mereka berambisi untuk mencapai kemakmuran bersama di bawah kepemimpinan Jepang, sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, Jepang mengharapkan dukungan bangsa Indonesia dengan memberikan kontribusi berupa tenaga dan kekayaan alam.
2. Jepang membentuk Gerakan Tiga A, yang terdiri dari Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia, sebagai upaya untuk mengajak bangsa Indonesia memberikan dukungan kepada Jepang. Mr. Syamsudin, yang merupakan mantan anggota Parindra yang kurang dikenal, dipilih untuk memimpin gerakan ini. Melalui inisiatif ini, Jepang mengandalkan pemuda Indonesia, terutama dalam menghadapi kehadiran tentara asing, terutama Sekutu yang berselisih dengan Jepang. Pemuda-pemuda ini dilatih secara militer dan pendidikan untuk memperkuat semangat dukungan kepada Jepang.
3. Jepang melepaskan pemimpin-pemimpin Indonesia yang sebelumnya ditahan oleh

Belanda, termasuk Ir. Sukarno dan Mohammad Hatta.

4. Pemerintah Jepang memberi peluang kepada para pemimpin Indonesia untuk mengisi jabatan-jabatan kunci yang sebelumnya didominasi oleh orang Belanda (Hidayat, 2018: 36).

Pada 8 September 1942, Jepang mengeluarkan undang-undang Nomor 2 yang memberikan mereka kendali penuh atas semua organisasi nasional, yang mengakibatkan lumpuhnya aktivitas politik dan perkumpulan di Indonesia. Hal ini menyebabkan kelumpuhan aktivitas organisasi nasional yang berjuang untuk kemerdekaan, seperti Parindra dan GAPI (Gabungan Politik Indonesia). Untuk memperkuat dominasinya di Indonesia, pemerintah militer Jepang menerapkan strategi pembentukan Gerakan Tiga A, yang bertujuan untuk merekrut dan memobilisasi tenaga rakyat untuk perang di Asia Timur Raya. Namun, upaya ini tidak berlangsung lama karena rakyat Indonesia tidak mampu menahan kekejaman militer Jepang dan eksploitasi yang dilakukan oleh mereka. Sebagai respons, Jepang kemudian mendirikan organisasi baru, PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat), dengan tujuan untuk mendapatkan simpati rakyat melalui tawaran kerjasama dengan para pemimpin Indonesia (Insneini dan Apid, 2008: 31-32).

Melalui organisasi PUTERA, Jepang mengharapkan agar pemimpin Indonesia dapat meyakinkan kelompok nasionalis sekuler dan intelektual untuk mengalirkan pemikiran dan energi mereka dalam perang melawan Sekutu. Meskipun gerakan PUTERA tidak menghasilkan hasil konkret, namun berhasil menggalang semangat patriotisme dan kesadaran akan kemerdekaan Indonesia sebagai persiapan untuk proklamasi. Dengan penyebaran PUTERA di seluruh Indonesia, pemuda-pemuda dari berbagai daerah membentuk perkumpulan dengan tujuan mencapai kemerdekaan yang dijanjikan oleh Jepang. Beberapa perkumpulan pemuda dari wilayah-wilayah berbeda, seperti Jong Celebes, Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, dan lainnya, aktif selama masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Jepang, muncul beberapa partai politik sebagai respons terhadap janji kemerdekaan Jepang, serta munculnya gerakan kemerdekaan lainnya seperti BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) (Nugraha dan Utomo, 2018: 83).

Dengan cara tersebut, Jepang merancang strategi untuk memperoleh dukungan empati dari penduduk Indonesia, dengan harapan agar negara tersebut akan membantu Jepang saat itu. Namun, kenyataannya adalah semua itu hanya berupa janji manis belaka yang disampaikan oleh Jepang kepada bangsa Indonesia. Di tengah situasi perang yang sedang berlangsung, lembaga-lembaga propaganda yang telah ada sebelumnya, seperti Gerakan Tiga A dan PUTERA, kini tidak lagi efektif dalam peran mereka. Kemudian, muncul gerakan baru yang dikenal sebagai Jawa Hokokai pada tanggal 29 April 1944. Gerakan ini, yang dinamai Jawa Hokokai, bertindak sebagai tempat untuk mengumpulkan semua organisasi yang memiliki ciri multirasial. Ini melibatkan tidak hanya organisasi eksklusif dari para pemimpin nasionalis sekuler dan Islam, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok pemuda, perempuan, dan kelompok etnis nonpribumi. Beberapa organisasi penting yang sudah ada sebelum pembentukan Jawa Hokokai juga terlibat dalam gerakan ini (Imran, 2012:

52).

Pada bulan Oktober tahun 1943, Jepang mendirikan sebuah kelompok pemuda Indonesia yang penting, yaitu Peta (Pembela Tanah Air), yang merupakan sebuah pasukan sukarela bagi bangsa Indonesia. Pada akhir perang, jumlah anggotanya mencapai 37.000 orang di Jawa, 1.600 di Bali, dan sekitar 20.000 di Sumatera, yang dikenal sebagai Giyugun, atau prajurit sukarela dalam bahasa Jepang. Peta, berbeda dengan Heiho, tidak secara resmi menjadi bagian dari tentara Jepang, melainkan bertugas sebagai pasukan gerilya pendukung dalam melawan Sekutu. Para perwira Peta berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat, guru, kyai, dan mantan serdadu kolonial Belanda. Contohnya, Soedirman, yang dulunya adalah seorang guru di sekolah Muhammadiyah. Jepang berusaha untuk mengikutsertakan bangsa Indonesia dengan memberikan wadah bagi umat Islam dalam satu organisasi, untuk memudahkan mobilisasi mereka dalam mendukung perang Asia Timur Raya yang semakin sengit. Organisasi Islam yang sudah ada, seperti MIAI, diubah menjadi Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi) pada Oktober 1943, yang kemudian digunakan oleh Jepang untuk propaganda, meningkatkan semangat jihad melawan musuh. Meskipun Masyumi terlibat dalam politik Jepang, namun tetap mempertahankan identitasnya sebagai organisasi keagamaan, meskipun semua itu dilakukan untuk kepentingan kemenangan Jepang (Suhartono, 2001: 127).

Sebelum Masyumi didirikan, upaya Jepang untuk mendekati umat Islam di Indonesia sudah tampak dengan jelas. Salah satu metode utamanya adalah melalui perjalanan propaganda di Jawa yang dipimpin oleh Kolonel Hory, kepala departemen Agama, yang melakukan pertemuan dengan kiyai dan ulama. Untuk memperkuat dukungan terhadap pemerintah, mereka juga membawa orang Islam dari Jepang untuk menciptakan semangat solidaritas dan kerja sama dengan pemerintahan militer. Pemerintah juga menyelenggarakan pelatihan bagi tokoh-tokoh Islam, yang bisa dianggap sebagai upaya indoktrinasi perang suci yang diadakan sebanyak tujuh belas kali antara Juli 1943 dan Mei 1945. Selain itu, pemerintah merekrut pemuda Islam sebagai basis kekuatan dan membentuk organisasi militer berbasis Islam bernama Hizbullah pada tahun 1944.

Hizbullah merupakan organisasi pemuda yang didukung oleh Jepang, bersama dengan organisasi pemuda lain seperti Keibodan (pertahanan sipil) dan Seinendan (barisan pemuda), yang anggotanya berasal dari kalangan pemuda Islam maupun non-Islam. Keibodan adalah organisasi pemuda berusia 20-35 tahun yang bertugas dalam kepolisian, seperti penjagaan keamanan desa, dan lain-lain. Organisasi ini berada di bawah pengawasan Keimubu (departemen kepolisian) dan memiliki sekitar satu juta anggota. Menariknya, Keibodan diisolasi dari pengaruh kaum nasionalis (Suhartono, 2001: 127).

Seinendan, sebagai kelompok pemuda, memiliki tujuan untuk memperkuat pertahanan belakang serta mendorong semangat pembangunan Jawa Baru di Jepang. Mereka melakukannya dengan memberikan pelatihan kepada pemuda mengenai kedisiplinan, meningkatkan hasil pertanian, dan menanamkan rasa patriotisme Jepang dalam budaya kepahlawanan, yang dikenal sebagai Bushido (Imran, 2012: 52).

Kebijakan Jepang yang dibuat bertujuan untuk mengarahkan kembali ekonomi Indonesia guna mendukung upaya perang mereka dan upaya dominasi jangka panjang

terhadap Asia Timur dan Tenggara. Setelah pendudukan mereka di Indonesia, Jepang menerapkan sejumlah kebijakan di berbagai sektor, termasuk:

### 1. Bidang Politik

Dalam konteks politik, langkah pertama yang diambil oleh pihak Jepang adalah menghentikan segala aktivitas politik dan mengeluarkan larangan terhadap gerakan rakyat yang memiliki agenda politis. Terlihat bahwa pemerintah militer Jepang menerapkan sistem yang otoriter, menegaskan bahwa satu-satunya garis politik yang harus diikuti adalah yang mereka tentukan. Rakyat tidak diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka. Kemenangan yang cepat dicapai oleh tentara Jepang sangat mengesankan, memperkuat keyakinan akan superioritas dan ketrampilan mereka, serta meningkatkan reputasi Jepang di mata banyak orang. Keunggulan ini menjadi faktor utama dalam dominasi Jepang di kawasan Asia (Muljana, 2008: 7).

Sebetulnya, pemerintahan militer Jepang di Indonesia adalah pemerintahan yang otoriter. Untuk mengatur situasi, administrasi dibagi menjadi beberapa bagian. Jawa dan Madura dikuasai oleh Tentara ke-16, yang berpusat di Jakarta (sebelumnya Batavia). Sumatera dikuasai oleh Tentara ke-25 dengan pusatnya di Bukittinggi, sedangkan Indonesia bagian Timur dikuasai oleh Tentara ke-2 (Angkatan Laut) yang berpusat di Makasar. Bagian darat administrasi disebut Gunseibu, dan bagian laut disebut Minseibu. Setiap wilayah kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Pada mulanya, Jawa terbagi menjadi tiga Provinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat), serta dua daerah istimewa, Yogyakarta dan Surakarta. Namun, pembagian ini dianggap tidak efektif dan dihapus. Akhirnya, Jawa dibagi menjadi 17 Karesidenan (Syu) yang diperintah oleh seorang Residen (Syucokan). Karesidenan ini terdiri dari Kotapraja (Syi), Kabupaten (Ken), Kawedanan atau distrik (Gun), Kecamatan (Son), dan Desa (Ku) (Muttaqin, dkk, 2011: 83).

Berbagai kebijakan di bidang politik yang dapat diidentifikasi antara lain:

- a. Menetapkan larangan penggunaan bahasa Belanda dan Inggris, sementara mendorong penggunaan bahasa Jepang.
- b. Mendirikan gerakan tiga A.
- c. Memisahkan kekuatan militer Jepang di Indonesia menjadi tiga bagian.
- d. Mengubah struktur birokrasi pemerintahan menjadi gabungan antara pemerintahan militer dan sipil.
- e. Membangun hubungan baik dengan umat Islam di Indonesia.
- f. Mendirikan organisasi politik yang didirikan oleh pihak Jepang dan menjalin kerja sama dengan para tokoh nasionalis.

### 2. Bidang Ekonomi dan Sosial

Kebijakan pemerintah Jepang dalam mengatur sistem ekonomi secara garis besar bertujuan untuk memperoleh bahan mentah yang diperlukan untuk industri perang. Proses ini terbagi menjadi dua tahap utama, yakni tahap penguasaan dan tahap restrukturisasi. Pada tahap penguasaan, Jepang mengambil alih pabrik-pabrik gula yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda dan

dikelola oleh perusahaan swasta Jepang seperti Meiji Seiyō Kaisha dan Okinawa Sella Kaisha. Selanjutnya, dalam tahap restrukturisasi, Jepang menerapkan kebijakan-kebijakan seperti sistem autarki, di mana rakyat dan pemerintah memenuhi kebutuhan sendiri untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Ada juga implementasi sistem tonarigumi, di mana kelompok-kelompok tetangga yang terdiri dari 10-20 keluarga mengumpulkan setoran kepada Jepang. Selain itu, Jepang juga memonopoli hasil perkebunan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1942 yang dikeluarkan oleh Gunseikan, serta mengerahkan tenaga kerja untuk kebutuhan perang (Zulkarnain, 2012:87).

Dalam konteks sosial, penerapan sistem Romusha terjadi sebagai tanggapan terhadap eksploitasi ekonomi selama masa pendudukan Jepang. Praktik ini telah mengakibatkan kerusakan pada lingkungan dan memicu krisis ekonomi. Pemerintah Jepang memperkenalkan gerakan sosial melalui Kinrohosi atau kerja sukarela yang kemudian berubah menjadi kerja paksa demi kepentingan perang. Dengan berkembangnya wilayah pendudukan Jepang, diperlukan tenaga kerja besar untuk membangun infrastruktur pertahanan seperti bunkers, landasan udara, jalan, dan gudang bawah tanah. Tenaga kerja ini direkrut dari desa-desa yang padat penduduk di Jawa, dan proses ini dikenal sebagai Romusha. Pada awalnya, partisipasi dalam Romusha bersifat sukarela, tetapi seiring dengan eskalasi perang Pasifik, tekanan untuk bekerja meningkat, dan pengelolaan tenaga kerja diserahkan kepada organisasi lokal yang dikenal sebagai Romukyokai. Banyak Romusha yang tidak kembali atau meninggal karena kondisi kerja yang berat dan kurangnya dukungan gizi serta kesehatan yang memadai (Isnaeni dan Apid, 2008: 39).

Melihat keadaan sosial yang mengkhawatirkan itu, telah membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan para pejuang Peta untuk memulai pemberontakan. Mereka tidak bisa menahan diri ketika menyaksikan penderitaan yang dialami oleh para Romusha dan praktik eksploitasi lainnya, termasuk penipuan terhadap gadis-gadis Indonesia yang direkrut sebagai wanita penghibur (jugun lanfu) dan ditahan di lokasi tersembunyi. Pada awalnya, gadis-gadis tersebut dijanjikan pekerjaan seperti perawat, pelayan toko, dan kesempatan pendidikan, tetapi akhirnya mereka hanya dimanfaatkan untuk memuaskan prajurit Jepang di lokasi-lokasi tertentu seperti Solo, Semarang, dan Jakarta. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia selama pemerintahan Jepang juga termasuk pengenalan sistem birokrasi Jepang dalam administrasi di Indonesia, yang mengakibatkan transformasi dalam lembaga-lembaga sosial di berbagai wilayah.

### 3. Bidang Pendidikan

Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk ketidakadilan dalam mengakses pendidikan. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, hanya orang pribumi dari kelas menengah ke atas yang bisa mengenyam pendidikan formal, sementara golongan lebih rendah tidak memiliki kesempatan serupa. Namun, dengan kedatangan pemerintahan Jepang, paradigma pendidikan bergeser

menjadi prinsip bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, memiliki hak untuk memperoleh pendidikan formal. Jepang juga mengenalkan struktur pendidikan yang menyerupai sistem pendidikan di negaranya sendiri, dengan durasi sekolah dasar selama 6 tahun, menengah pertama selama 3 tahun, dan menengah atas selama 3 tahun. Model pendidikan ini telah menjadi bagian dari warisan Jepang yang terus diterapkan oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini (Isnaeni dan Apid, 2008: 40).

Salah satu kelemahan dalam sistem pendidikan adalah adopsi model militer. Ini berfokus pada persiapan untuk konflik bersenjata, yang mengharuskan siswa untuk menjalani pelatihan dasar militer dan mempelajari lagu kebangsaan Jepang. Bahkan, bahasa pengantar di sekolah telah berganti dari Bahasa Belanda menjadi Bahasa Jepang dan Indonesia, dengan guru-guru pun diwajibkan mengikuti kursus bahasa Jepang. Tetapi, yang menarik adalah desakan pemerintah Jepang agar rakyat Indonesia menghormati Dewa Matahari (Seikerei) dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang (Kimigoyo). Tidak semua warga Indonesia menerima ini, khususnya kalangan Islam seperti yang ditegaskan oleh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Zainal Mustafa, pengasuh Pesantren Sukamanah di Jawa Barat.

#### 4. Bidang Militer

Di ranah militer, Jepang telah menginisiasi berbagai organisasi gerakan militer yang dibentuk khusus untuk mengatasi situasi militer yang semakin sulit di kawasan Pasifik. Pada tahun 1943, mereka mulai meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda Indonesia di bidang militer, mengingat tekanan yang semakin meningkat di medan perang Asia-Pasifik. Dengan mengkonsolidasikan kekuatan mereka, Jepang mengumpulkan pemuda dan pelajar Indonesia sebagai sumber daya potensial untuk digunakan dalam pertempuran melawan Sekutu. Inilah yang kemudian melahirkan berbagai unit militer, seperti Seinendan untuk pemuda usia 14-22 tahun, Losyi Seinendan sebagai cadangan untuk Seinendan putri, Bakutai sebagai pasukan yang bersedia untuk bertempur sampai mati, Keibodan (atau dikenal sebagai Bogodan di Sumatera dan Borneo Konon Hokokudan di Kalimantan) sebagai bantuan polisi dengan anggota berusia 23-35 tahun, Hizbullah untuk anggota kaum Muslim, Heiho sebagai asisten prajurit Jepang dengan anggota berusia 18-25 tahun, Jawa Sentotai/Hokokai sebagai barisan pertahanan khusus Jawa, Suisyintai sebagai pelopor, Peta atau Pembela Tanah Air yang merupakan tentara lokal yang dibentuk oleh Kumakichi Harada berdasarkan Osamu Serei No. 44 tanggal 23 Oktober 1943, Gokutokai sebagai sebuah korps pelajar yang didirikan pada bulan Desember 1944, dan Fujinkai sebagai himpunan wanita yang terbentuk pada tanggal 23 Agustus 1943 (Zulkarnain, 2012: 87).

#### ***Pendidikan Militer***

Pendidikan yang diperkenalkan pada masa Jepang menitikberatkan pada dimensi militer, dengan mayoritas materi pelajaran berkaitan dengan bidang militer. Contohnya, setiap siswa diminta untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar baris-

berbaris, penggunaan senjata, terutama senjata api seperti senapan, dan strategi perang. Siswa yang memperlihatkan keahlian dalam hal-hal tersebut akan dipilih sebagai pemimpin regu batalion, sementara yang lainnya akan bertindak sebagai anggota biasa.

Para pemimpin dalam struktur militer dipilih dari berbagai lapisan masyarakat yang berbeda. Aidanco, yang merupakan Komandan Batalyon, dipilih dari kalangan elit seperti pegawai pemerintah, pemimpin agama, pamong praja, politikus, dan profesional hukum. Cudanco, yang menjabat sebagai Komandan Kompi, dipilih dari kalangan pekerja yang belum mencapai jabatan tinggi, seperti guru dan staf administratif. Shudanco, yang bertugas sebagai Komandan Peleton, umumnya dipilih dari kalangan pelajar sekolah menengah. Sedangkan Budanco dan Giyuhei, yang menempati posisi Komandan Regu dan Prajurit Sukarela, dipilih dari kalangan pelajar sekolah dasar.

Pembentukan tersebut dimaksudkan untuk mendidik dan melatih generasi muda agar dapat mempertahankan dan memperjuangkan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Tujuan yang tersirat adalah untuk menyediakan sumber daya manusia yang siap digunakan untuk memperkuat upaya mencapai kemenangan akhir dalam konflik saat itu. Di era pendudukan Jepang, pendidikan tidak bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia, tetapi lebih untuk menyiapkan generasi muda agar dapat mendukung kepentingan perang Jepang dalam melawan sekutu.

Pada masa itu, sedikit pemuda di Indonesia yang memberontak karena Jepang pada awalnya mengkomunikasikan bahwa pendidikan militer yang mereka berikan bertujuan untuk kebaikan rakyat Indonesia. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada pemuda-pemuda tersebut di masa depan, dengan menggarisbawahi pentingnya kekuatan militer dalam mencapainya. Sebagai hasilnya, pemuda-pemuda tersebut dengan rela mengikuti semua program pendidikan militer yang diselenggarakan oleh pemerintah Jepang.

Kalimat Janji tersebut yang ingin ditanamkan oleh pemerintahan Jepang dalam pikiran pemuda-pemuda di Indonesia adalah bahwa mereka diminta untuk menerima pendidikan militer yang intensif dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi kesatuan Indonesia di masa depan. Namun, yang tidak disadari oleh pemuda-pemuda Indonesia adalah bahwa kurikulum tersebut sebenarnya merupakan strategi Jepang untuk memperkuat kehadirannya dalam konteks perang Asia Pasifik.

Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang dapat disimpulkan sebagai berikut (Prayoga, 2013):

- a. Pendidikan Dasar, yang sebelumnya dikenal sebagai Sekolah Rakyat atau Kokumin Gakko, memiliki jangka waktu belajar selama 6 tahun. Ini mencakup Sekolah Pertama, yang pada masa penjajahan Belanda di Hindia disebut sebagai Sekolah Dasar dengan durasi studi 3 atau 5 tahun untuk masyarakat pribumi.
- b. Pendidikan Lanjutan terbagi menjadi Shoto Chu Gakko (Sekolah Menengah Pertama) dengan durasi studi 3 tahun, dan Koto Chu Gakko (Sekolah Menengah Tinggi) juga dengan durasi studi 3 tahun.
- c. Pendidikan Kejuruan mencakup lembaga pendidikan lanjutan yang mengkhususkan diri dalam bidang vokasional seperti pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian.

d. Pendidikan Tinggi mencakup pendidikan di perguruan tinggi dan universitas.

Untuk mendapatkan dukungan dari pemimpin pribumi, Jepang memulai dengan mengusulkan ide pembentukan Putera Tenaga Rakyat yang akan dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno, M. Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan K.H. Mas Mansur pada bulan Maret 1943. Langkah ini diambil setelah kegagalan Triple Movement yang tidak melibatkan perwakilan dari kalangan pribumi. Namun, dalam waktu satu tahun, upaya ini juga mengalami nasib serupa. Meskipun begitu, Jepang tetap melibatkan Ki Hajar Dewantoro sebagai penasehat pendidikan mereka. Upaya Jepang untuk memanfaatkan tenaga kerja pribumi ini dipengaruhi oleh pengalaman buruk mereka dalam menerapkan sistem *Nipponize* di Manchuria dan China. Oleh karena itu, di Indonesia, mereka mencoba pendekatan pendidikan yang mempertimbangkan kurikulum lokal. Meskipun penting untuk dicatat bahwa menjelang berakhirnya pendudukan, ada indikasi kuat bahwa Jepang akan kembali menerapkan sistem *Nipponize*, dengan mengirimkan Sendenbu (penyebarkan propaganda Jepang) untuk menyebarkan ideologi yang diharapkan dapat menggantikan semangat kemerdekaan Indonesia. Jepang juga merasa penting untuk melatih guru-guru agar memiliki pemahaman yang seragam tentang tujuan dan kebijakan pemerintahannya. Beberapa topik utama dalam pelatihan tersebut mencakup:

- a. Indoktrinasi ideologi Hakko Ichiu.
- b. *Nippon Seisyin*, yang mengacu pada pelatihan militer dan semangat Jepang.
- c. Bahasa, sejarah, dan adat istiadat Jepang.
- d. Geopolitik bumi.
- e. Masakan dan musik Jepang. Dalam hal pendidikan sekolah, Jepang mewajibkan setiap siswanya untuk melakukan kegiatan berikut setiap pagi:
- f. Nyanyikan lagu kebangsaan Jepang, *Kimigayo*, setiap pagi.
- g. Kibarkan bendera Jepang, *Hinomaru*, dan berikan penghormatan kepada Kaisar Jepang, *Tenno Heika*, setiap pagi.
- h. Setiap pagi, mereka juga diharuskan melakukan *Dai Toa*, bersumpah setia pada visi Asia Raya. Setiap pagi, mereka juga diwajibkan melakukan *Taiso*, senam Jepang.
- i. Melakukan latihan fisik dan militer.
- j. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai prasyarat dalam pendidikan. Bahasa Jepang juga dijadikan mata pelajaran wajib.

Pendidikan militer yang diperkenalkan oleh Jepang menimbulkan efek baik dan buruk. Meskipun awalnya ditujukan untuk mendukung agenda perang Jepang, generasi muda Indonesia berhasil menggunakan pendidikan militer tersebut sebagai sarana untuk memperkuat diri mereka dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

## KESIMPULAN

Selama tiga setengah tahun pemerintahan Jepang, Indonesia mengalami masa kritis dalam sejarahnya. Setelah berhasil mengalahkan Belanda, Jepang segera mengambil alih pemerintahan Hindia Belanda. Pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang resmi menduduki Indonesia dan dengan cepat melakukan perubahan untuk menghilangkan dominasi Barat. Keberhasilan Jepang dalam mempromosikan Tiga A mereka, yang melambangkan mereka sebagai "Cahaya Asia", "Pemimpin Asia", dan "Pelindung Asia", didorong oleh kemiripan fisik mereka dengan orang Indonesia. Hal ini memberikan keuntungan bagi Jepang karena dengan mudahnya memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia memandang Jepang sebagai pembebas dari penjajahan Belanda, dan Indonesia memasuki masa pendudukan militer oleh Jepang. Berbeda dengan pemerintahan kolonial Belanda yang hanya mempunyai pemerintahan sipil, pendudukan Jepang ditandai dengan tiga pemerintahan pendudukan militer di Sumatera, Jawa-Madura, dan wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia terfokus pada dua prioritas: menghilangkan pengaruh Barat di kalangan penduduk dan memobilisasi mereka untuk mendukung upaya perang Jepang. Kebijakan ini bertujuan untuk menata kembali perekonomian Indonesia untuk mendukung upaya perang Jepang dan memperkuat dominasi mereka di Asia Tenggara dan Timur Jauh dalam jangka panjang. Setelah menduduki Indonesia, Jepang menerapkan berbagai kebijakan di berbagai sektor, antara lain politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan militer

## DAFTAR PUSTAKA

- Aman. (2015). *Revolusi Sosial Di Brebes*. Yogyakarta: Ombak.
- Aprilia, A. K., Sugiyanto, & Handayani, S. (2017). The Role Of Nahdlatul Ulama On Indonesian National Movement On 1926-1945. *Jurnal Historica*, 1(2), 255-267
- Bizawie, & Milal, Z. (2014). *Laskar Ulama -Santri & Resolusi Jihad Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949)*. Jakarta: Pustaka Kompas.
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG. *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 13(2), 189-205.
- Fadli, Rijal, M., & Hidayat, B. (2018). *KH. Hasyim Asy'ari Dan Resolusi Jihad Dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945*. Lampung.
- Hamid, Rahman, A., & Saleh, M. (2011). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Hariyono. (2008). *Penerapan Status Bahaya Di Indonesia Sejak Pemerintahan Kolonial Belanda Hingga Pemerintahan Orde Baru*. Jakarta: Pensil.
- Hasim, H. (2018). PERKEMBANGAN POLITIK KETATANEGARAAN ISLAM DI INDONESIA. *BILANCIA*, 12(2), 279-296.
- Imran, & Amrin. (2012). *Indonesia Dalam Arus Sejarah, Jilid VI*. Jakarta: PT Ichtiar Baru.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta.
- Muttaqin, & Dkk. (2011). *Sejarah Pergerakan Nasional*. Bandung: Humaniora.
- Muljana, S. (2008). Kesadaran Nasional; Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan (Jilid 1) (Vol. 1). LKIS PELANGI AKSARA.
- Notosusanto, N. (1979). *Tentara PETA Pada Zaman Pendudukan Jepang*. Jakarta: Gramedia.
- Nugraha, A., & Utomo, C. (2018). "Peristiwa 03 Oktober 1945 Di Kota Pekalongan

- (Analisis Dampak Sosial & Dampak Politik)". *Journal Of Indonesian History*, VII(1), 82-87
- Permadi, E. G., & Purwaningsih, S. M. (2015). Politik Bahasa Pada Masa Pendudukan Jepang. *AVATARA, E-Journal Pendidikan Sejarah*, 3(3), 590-603
- Prayoga, N. (2013). *Analisa Desain Kapasitas Saluran Drainase di Jalan Yos. Sudarso Kota Lubuklinggau*. Universitas Musi Rawas.
- Ricklefs, M. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. JAKARTA: Serambi Ilmu.
- Suhartono. (2001). *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Boedi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sofianto, K. (2014). Garut Pada Masa Pemerintahan Pendudukan Jepang (1942-1945). *Sosiohumaniora*, 16(1), 70-86.
- Wacana, T., Muljana, & Slamet. (2008). *Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan, Jilid II*. Yogyakarta: Lkis.
- Wicaksono, P. (2021). Perubahan Kondisi Sosial Indonesia Pada Masa Kependudukan Jepang 1942-1945. *Jurnal Of Indonesian History And Education*, 1(1), 90-95.
- Yasmis. (2007). Jepang Dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Sejarah Lontar*, 4(2), 24-32